

Tembok Benteng Kotagede (Baluwarti) Yogyakarta Berangsur-Angsur Musnah!

Sugeng Riyanto

Keywords: cultural resource management, conflict management, conservation, protection, utilization, heritage

How to Cite:

Riyanto, S. (2006). Tembok Benteng Kotagede (Baluwarti) Yogyakarta Berangsur-Angsur Musnah!. *Berkala Arkeologi*, 26(1), 21–38.
<https://doi.org/10.30883/jba.v26i1.922>



Berkala Arkeologi

<https://berkalaarkeologi.kemdikbud.go.id/>

Volume 26 No. 1, 2006, 21-38

DOI: [10.30883/jba.v26i1.922](https://doi.org/10.30883/jba.v26i1.922)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

TEMBOK BENTENG KOTAGEDE (*BALUWARTI*) YOGYAKARTA BERANGSUR-ANGSUR MUSNAH!

Sugeng Riyanto

1. PENGANTAR: Dulu dalam Kini

Konteks kekinian warisan budaya memiliki berbagai aspek: ada yang menempatkannya sebagai potensi akademik, yaitu sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan berbagai kajian; ada yang menempatkannya sebagai potensi ekonomik, yaitu sebagai komoditi; ada yang menempatkannya sebagai bahan apresiasi ideologik, *entah* itu dikaitkan dengan kesakralan maupun sebagai bahan pendidikan; dan tidak sedikit yang mnempatkannya sebagai “penghambat” pembangunan. Cooper (1991: 224) antara lain mengemukakan adanya konflik klasik antara pihak yang berpandangan bahwa warisan budaya sebagai aset nasional yang tidak tergantikan (*irreplaceable*) dengan pandangan bahwa warisan budaya sebagai komoditi yang dapat dikonsumsi; atau antara *demand access to heritage attractions* dengan yang *strive to ration access and impact on the heritage*.

Sebagai warisan budaya, Kotagede di Yogyakarta yang dibangun pada abad XVI dalam batas tertentu berada pada kerangka konflik tersebut. Sebuah kenyataan memang, bahwa *baluwarti* sebagai batas fisik kota dan bagian paling penting pada masanya berangsur-angsur musnah. Di sisi lain, perkembangan disiplin arkeologi sebenarnya sudah menempatkan persoalan semacam ini sebagai bagian kajiannya. Dalam hal ini konteks politik dan publik juga ditempatkan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas warisan budaya, dan bukan *melulu* berorientasi pada konteks akademik. Kerangka teoritik, filosofik, dan historik barangkali memang diperlukan untuk melihat bagaimana tembok benteng Kotagede berangsur-angsur musnah.

1.1. Kerangka Teoritik

Meskipun “manusia” diakui sebagai bagian dari alam dan termasuk obyek penyellidikan ilmu alam, namun segenap ilmu yang tidak termasuk dalam “ilmu alam” dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu manusia (Beerling dkk., 1986). Namun persoalannya adalah, apakah ilmu-ilmu tersebut harus menggunakan metode-metode “ilmu alam” dalam memberikan penjelasan gejala-gejala yang dikajinya? Tidak bisa dilepaskan dari masalah itu, perkembangan ilmu arkeologi (sebagai salah satu ilmu manusia) disimpulkan telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (akademik), aliran filsafat ilmu (filosofik), kelembagaan (politik), serta perkembangan sosial (publik) (Tanudirjo, 2003).

Demikianlah, arkeologi pasca-prosesual merupakan bentuk yang cenderung fenomenal dari pengaruh-pengaruh di atas. Sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan Beerling dkk., maka dengan tegas arkeologi pasca-prosesual tidak mengharuskan penggunaan metode ilmu alam dalam kajiannya, tetapi membuka diri dari berbagai cara yang dirasakan cukup untuk memberi penjelasan yang memuaskan. Namun demikian, dengan tegas pula dinyatakan bahwa apapun penjelasan yang diberikan oleh arkeolog atas apa yang telah dicapai dalam kajiannya, adalah bersifat sementara, subyektif, relatif, dan “belum tentu benar”, karena apa yang disebut pencapaian pengetahuan dalam arkeologi pada dasarnya adalah “konstruksi” arkeolog tentang masa lalu; pengetahuan yang mungkin saja benar-benar terjadi, dan sebaliknya, mungkin saja sama sekali tidak pernah terjadi.

Dalam tulisannya yang berjudul “*Post-modernism, Post-structuralism, and Post-processual Archaeology*”¹, dengan rinci Hodder (1991) membahas tentang kerangka munculnya arkeologi pasca-prosesual, khususnya fenomena *post-modernism* yang merebak dunia. Selain itu, secara khusus Tanudirjo (2003) juga membahas tentang kerangka pasca-modernisme yang membingkai perkembangan ilmu arkeologi, yang didasarkan atas pandangan Barat sebagaimana uraian berikut ini.

¹ lihat *The Meaning of Things*, Ian Hodder (ed.) London: Harper Collins. 1991.

1.2. Kerangka Filosofik

Kehadiran pasca-modernisme dianggap sebagai reaksi atas pandangan modernisme dalam tataran tata kehidupan. Di bidang filsafat ilmu, pandangan modernisme, yang berakar pada jaman “pencerahan” (*Aufklärung*), diyakini dapat menyediakan penjelasan yang tuntas atas realita yang ada; dapat memberikan kenyamanan hidup melalui sains dan teknologi, termasuk “rekayasa” sosial. Jiwa positivisme² begitu dominan dalam pandangan ini, dengan menyediakan jawaban atas setiap persoalan secara dikotomik: “ya” atau “tidak”, “hitam” atau “putih”, “yang ini” atau “yang itu”, dan seterusnya. Untuk itulah metode sains yang biasa diterapkan dalam ilmu alam juga “wajib” diterapkan dalam arkeologi; caranya dengan berpandangan bahwa metode deduktiflah yang paling bisa memberikan jawaban yang benar dalam kajian arkeologi. Inilah yang merasuki arkeologi prosesusal, yang pada sekitar tahun 1980-an juga dianut oleh hampir seluruh arkeolog di Indonesia.

Sejalan dengan waktu, pencapaian-pencapaian yang dibingkai oleh pandangan modernisme, atau prosesusal dalam arkeologi, tidak semuanya menghasilkan jawaban yang memuaskan. Dalam bidang lain, bahkan penerapan hasil riset telah menimbulkan berbagai ketimpangan, kemelaratan, serta merosotnya rasa kemanusiaan, akibat eskploitasi. Di sisi lain, modernisme juga menyebabkan keterasingan ilmu terhadap konteksnya, akibat dominasi sinisme. Satu hal pokok yang menjadi kunci “dosa” modernisme adalah disisihkannya peran aktif individu, dan lebih menempatkannya dalam bingkai besar sistem sosial, sebagaimana ditulis oleh Hodder (1991).

Pada masa ini, kritik terhadap pandangan modernisme juga melibatkan para arkeolog dunia. Pandangan modernisme dianggap bertanggung jawab atas munculnya dominasi pihak yang memiliki kekuatan atas berbagai sumber daya, sebagaimana ditunjukkan oleh pemikiran ekonomi berbasis modal (kapitalis); pada gilirannya, kemajemukan disingkirkan, sehingga tidak dapat dihindari munculnya dominasi, otoritas, dan totalitas. Modernisme sebenarnya tidak lebih dari rekayasa yang tidak bebas nilai, dan hanya merupakan upaya yang bertujuan untuk Pajang.

² Prinsip dasar positivisme meliputi tiga hal, yaitu harus nyata, harus akurat, dan harus pasti

melanggengkan kekuatan tertentu melalui dominasi (Hodder, 1991; Tanudirjo, 2003).

Konstruksi yang dibangun oleh pandangan modernisme tidak henti-hentinya dikritisi dan bahkan didekonstruksi oleh pendukung pasca-modernisme. Sejalan dengan itu, pendukung arkeologi pasca-prosesual juga melakukan hal yang sama. Dalam kerangka pikir pasca-modernisme, pengetahuan selalu bersifat subyektif dan tidak pernah dapat bersifat obyektif; tergantung kepada “siapa” dan “untuk apa” pengetahuan itu diperoleh.

Tidak terkecuali di bidang arkeologi, pemikiran-pemikiran pasca-modernisme membawa kepada pandangan teoritik bahwa budaya semestinya juga dilihat sebagai hasil dari setiap pribadi, yang aktif menyusun tatanan sosial, dan bukan dipahami sebagai “sistem” yang materialistik (Tanudirjo, 2003). Oleh karena itu, kebudayaan juga bersifat relatif; tidak ada tolok ukur sehingga seolah-olah budaya tertentu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan yang lain; masing-masing memiliki konteksnya yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat pendukung budaya itu sendiri. Parameter yang sudah terlanjur ada, adalah tidak lebih sebagai konstruksi kaum modernisme, yang sudah saatnya untuk didekonstruksi.

Tembok benteng Kotagede adalah salah satu warisan budaya yang penting bagi beberapa kalangan, dan sama sekali tidak penting bagi kalangan lainnya. Laju pembangunan sebagai sebuah tuntutan dan laju pembangunan sebagai pendorong kemusnahan warisan budaya bagaikan dua kubu yang berseberangan di situs ini. Renfrew dan Paul Bahn (1996: 521) sebenarnya sudah memperingatkan bahwa banyak faktor yang bisa merusak situs, tetapi faktor manusia adalah yang paling kompleks dan rumit, seperti pembangunan (jalan, gedung, perumahan, dsb.), pertanian, serta kegiatan yang kurang disadari, yaitu pariwisata. Meskipun demikian, harus ada yang peduli atas “penderitaan” yang dialami *bahuwanti* Kotagede, justru karena terkandung potensi di dalamnya yang bisa dimanfaatkan secara “adil”.

1.3 Kerangka Historik

Wilayah Mataram awalnya adalah tanah perdikan di bawah kekuasaan Kerajaan

Pajang. Perjalanan sejarah selanjutnya menyebutkan bahwa Ki Ageng Pemanahan menyerahkan wilayah Mataram kepada puteranya yang bernama Sutawijaya yang kemudian bergelar Raden Ngabehi Loring Pasar. Sutawijaya kemudian membangun tembok keliling untuk memperkuat wilayah Mataram dan setelah selesai, dia menyerang Pajang hingga mengalahkannya. Sutawijaya selanjutnya menjadi raja Mataram yang pertama dan bergelar *Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama*, serta menetapkan Kotagede sebagai pusat pemerintahannya. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan ini meluaskan kekuasaannya di berbagai wilayah di Jawa (Atmosudiro, 2002: 143 – 144).

Dalam perjalanan sejarahnya, Kotagede tidak hanya menjadi pusat pemerintahan pada masa Panembahan Senopati tetapi juga sebagian masa Sultan Agung. Setelah wafat beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Kotagede. Oleh karena itu, sebenarnya Kotagede tidak lama menjadi pusat pemerintahan, yaitu sekitar 58 tahun, dimulai sejak jatuhnya Pajang pada tahun 1582 M (Brandes, 1894: 415) sampai dengan tahun 1640 M.

Meskipun hanya setengah abad sebagai ibu kota namun Kotagede telah dapat menempatkan diri dan berperan besar dalam sejarah kebudayaan di Jawa. Berdasarkan data sejarah, dalam masa yang pendek tersebut Kraton Kotagede telah memiliki tata ruang dan komponen-komponen kota seperti lazimnya kota-kota pusat pemerintahan kerajaan Islam. Kotagede sebagai kota pusat pemerintahan dibuktikan dengan adanya tinggalan arkeologis, yaitu: kraton atau kedhaton, tembok keliling (*baluwarti*), *jagang*, *cepuri*, masjid, pasar, permukiman, dan pemakaman. Komponen-komponen tersebut merupakan data yang dapat mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat pendukungnya (Atmosudiro, 2002: 144).

2. PENDAHULUAN: Kerangka Studi

2.1 Kerangka Persoalan

Persoalannya memang klise, yaitu warisan budaya yang rusak akibat laju pembangunan, itu saja. Laju kerusakan Kotagede memang tidak seragam pada setiap titik; dan titik paling parah justru ada pada *baluwarti* sebagai batas fisik

Kotagede lama. Pertanyaan selanjutnya adalah:

- ▶ Seperti apa sebenarnya kedudukan dan peran Kotagede saat ini, atau dalam kalimat yang sederhana, bagaimana citra Kotagede sekarang?
- ▶ Bagaimana pula proses kerusakan *baluwarti*?
- ▶ Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi?
- ▶ Lalu bagaimana upaya untuk mengatasinya?

2.2 Tujuan Studi

Tujuan studi ini pada dasarnya berangkat dari kerangka persoalan yang penulis pelajari dari berbagai sumber maupun pengamatan langsung di lapangan. Jika dirumuskan, maka studi ini bertujuan untuk:

- ▶ Menggambarkan adanya perbedaan pandangan terhadap citra Kotagede
- ▶ Menggambarkan proses kerusakan *baluwarti*, khususnya ketika lahan situs dimanfaatkan
- ▶ Mengupayakan diketahuinya berbagai latar belakang yang mendorong terjadinya kerusakan *baluwarti*
- ▶ Memberi alternatif upaya pelestarian *baluwarti* berapa pun tembok benteng yang tersisa

2.3 Proses Studi

- ▶ Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui berbagai proses studi, yang antara lain meliputi:
- ▶ Studi pustaka untuk mendapatkan gambaran tentang kerangka historis, kerangka persoalan, kerangka akademik, teoritik, dan filosofik, serta pemahaman kekinian di Kotagede
- ▶ Studi lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang citra Kotagede melalui observasi lisan (wawancara); serta latar belakang dan proses kerusakan *baluwarti*
- ▶ Pendekatan teoritik yang antara lain digunakan untuk menganalisis perbedaan laju kerusakan antara *baluwarti* dengan bagian tengah kota; serta untuk mendapatkan alternatif sebagai upaya pelestarian *baluwarti*

3. DUA CITRA KOTAGEDE: “Kata Orang” vs “Kata Arkeolog”

Paling tidak, Kotagede saat ini memiliki dua citra, yaitu sebagai kawasan yang “dikenal orang” dan sebagai kawasan situs arkeologi (*archaeological heritage*). Umumnya, orang mengenal Kotagede kuna “hanya” meliputi daerah sekitar *cepuri* (benteng kraton), makam, mesjid agung, *watu gilang*, dan *watu gatheng*. Tempat-tempat yang disebutkan ini berada di bagian tengah jika Kotagede dilihat sebagai kota kuna yang dikelilingi oleh *baluwarti* (terdiri atas tembok benteng dan parit besar atau *jagang*) seperti terlihat pada lampiran 2n.

Sementara itu, sebagai *archaeological heritage*, Kotagede sebenarnya bukan hanya meliputi daerah seperti disebutkan di atas tetapi lebih luas dari itu, yaitu kawasan yang dibatasi oleh *baluwarti* (benteng kota) beserta seluruh isinya. Berkelana di Kotagede Lama semestinya dimulai dari batas kota yang terdiri atas *jagang* (parit besar) dan tembok benteng (yang terbuat dari batu putih). *Jagang* yang dalamnya antara 1-3 meter dengan lebar sekitar 15 hingga 25 meter ini dapat dielusuri sebagai berikut. Jika mulai dari sisi timur maka kita harus berjalan dari Kampung Baluwarti lurus ke selatan, kemudian mengikuti aliran Sungai Manggisian sampai wilayah Dukuh Sareman membelok ke barat, lalu berbelok ke utara mengikuti aliran Sungai Gajah Wong sampai wilayah Dukuh Belehan, kemudian berbelok ke timur sampai kampung Baluwarti lagi (Andrisijanti, 1997: 62).

Berbagai kegiatan penelitian dan pendokumentasian sebenarnya telah dilakukan dan sekaligus telah menghasilkan berbagai informasi. Namun keberadaan *baluwarti* (benteng dan *jagang*) sebagai batas kota yang sesungguhnya, saat ini memang dalam keadaan rusak berat sehingga kemonumentalannya tidak lagi dikenal oleh masyarakat, kecuali oleh kelompok ahli atau peminat khusus (Prapanca, 2003: 110).

4. PROSES KERUSAKAN: Ketika Tembok dan *Jagang* “Dimanfaatkan”

Sebelum memahami “mengapa” tembok dan *jagang* (sebagai batas kota pusat pemerintahan Mataran yang pertama pada abad ke-16) berangsur-angsur rusak, tentu perlu diketahui “oleh siapa” dan “untuk apa”. Beberapa kegiatan yang secara langsung merusak bangunan ini antara lain adalah³:

³ simak juga lampiran 3

- ▶ pemanfaatan bahan tembok benteng (batu putih) sebagai fondasi bangunan rumah penduduk sekitarnya; hal ini berakibat langsung pada konstruksi tembok yang semakin lama rata dengan tanah
- ▶ pemanfaatan *jagang* sebagai lahan pertanian penduduk, khususnya sawah; untuk keperluan ini, penduduk memodifikasi jagang dan tembok sehingga tidak menyisakan tanda-tanda sebagai bekas *baluwarti*, kecuali penggal cekungan sisa jagang
- ▶ perumahan modern dibangun persis pada jagang oleh pengembang; meskipun beberapa perumahan tidak memodifikasi morfologi muka tanah (cekungan bekas *jagang* masih tampak), namun keberadaannya yang tepat di atas *baluwarti* jelas menghilangkan jejak “kekunaan”
- ▶ jalan lingkar (*ring road*) dibangun menembus benteng dan *jagang* oleh pemerintah; meskipun lebar jalan lingkar “hanya” beberapa meter, namun keberadaannya secara tidak langsung mendorong kegiatan fisik lainnya seperti pembangunan gedung dan perumahan baru di sekitarnya.

Jelas terlihat bahwa penduduk sekitar *baluwarti*, pengembang, dan pemerintah (daerah) tidak menempatkan tembok benteng kota dan *jagang* sebagai sumber daya yang menguntungkan sehingga dimanfaatkan sesuai dengan “tuntutan” kebutuhan masing-masing tanpa memperhitungkan aspek kelestariannya. Penduduk menganggap batu putih sangat cocok sebagai fondasi bangunan rumah mereka; pengembang menganggap beberapa lokasi yang bertepatan dengan *baluwarti* sangat cocok sebagai perumahan modern; pemerintah daerah dengan semboyan “demi pembangunan” melihat lahan *baluwarti* bagian selatan paling cocok untuk membangun jalan lingkar. Lalu bagaimana menurut arkeolog atau para ahli terkait? Jelas, masyarakat (penduduk, pengusaha, dan pemda) dianggap telah melakukan kesalahan fatal karena menyebabkan hancurnya *archaeological heritage* yang sangat penting yang pada abad ke-16 oleh pendiri Mataram (Sutawijaya atau Panembahan Senopati) dibangun dengan berbagai alasan, baik politik, ekonomi, militer, maupun religi. Persoalannya adalah mengapa “perusakan” dilakukan? Pertanyaan yang lebih spesifik adalah mengapa hanya sekitar *baluwarti*? Sementara bagian tengah kota justru dijaga, bahkan dipelihara dengan begitu serius!

5. ANALISIS ATAS DUA BAGIAN KOTA: Profan *versus* Sakral

5.1 Baluwarti

Tentu saja kita tidak puas jika pertanyaan “mengapa *baluwarti* sebagai bagian kota dirusak secara sadar” dijawab dengan “karena dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan”, meskipun kenyataannya begitu. Dalam kaitannya dengan hal ini, Kaplan dan Albert A. Manners menjelaskan tentang orientasi ekologi-budaya yang membawa pada wawasan bahwa manusia sebagai suatu spesies, seperti juga makhluk hidup lainnya, menghadapi keharusan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengeksploitasinya (2002: 116). Penduduk, pengembang, maupun pemerintah dalam hal ini memandang sebagian besar situs Kotagede, khususnya *baluwarti*, sebagai lingkungan yang cocok bagi kebutuhan mereka sehingga terdorong untuk memanfaatkan dan mengeksploitasinya. Kehancuran secara berangsur-angsur tetapi sistematis, karena dilakukan dengan sadar dan tanpa “beban”, adalah suatu konsekuensi logis dari adanya eksplotitasi tersebut.

Secara eksplisit penjelasannya sebenarnya sederhana, yaitu dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masa kini. Persoalan abad ke-16 yang menuntut dibangunnya benteng yang kokoh sehingga diperlukan dua lapis, adalah berbeda dengan persoalan masa kini karena penduduk membutuhkan bahan bangunan, karena pengembang membutuhkan lahan untuk perumahan, karena pemerintah membutuhkan lahan untuk membangun jalan lingkar sebagai jawaban atas “tuntutan pembangunan”. Dan, yang paling penting adalah tidak ada kekuatan yang bisa mencegahnya, termasuk arkeolog yang hanya bisa berteriak “jangan!” tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang lebih jelas lagi adalah seluruh komponen *baluwarti* bersifat profan, dalam arti tidak ada bagian yang berkaitan dengan kesakralan.

5.2 Bagian Tengah Kota

Pertanyaan selanjutnya, “mengapa bagian tengah kota” bisa selamat dan ada kecenderungan dilestarikan dengan sangat serius? Jika melihat kasus *baluwarti* maka akan membawa kepada pemikiran bahwa ada “kekuatan” yang mencegah eksploitasi fisik terhadap sebagian besar komponen kota di bagian tengah ini. Sebelum bisa memperkirakan kekuatan macam apa, tentu saja harus diperinci

dulu apa saja yang ada di sana, karena pasti ada perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan *baluwarti*.

Seperti disebutkan pada awal tulisan ini, bagian tengah Kotagede kuna adalah meliputi daerah sekitar *cepuri* (benteng kraton), makam, mesjid agung, *watu gilang*, dan *watu gatheng*. Kecuali *cepuri* yang sebagian juga rusak, komponen lainnya masih “utuh” bahkan didukung oleh kegiatan pelestarian yang sistematis (konservasi). Jika diperhatikan, komponen yang lestari ini semuanya berkaitan dengan “kekuatan” yang bersifat religio-magis sehingga bersifat sakral. Menurut Marvin Harris, pandangan dan kepercayaan yang demikian merupakan bagian dari kebudayaan sebagai media untuk menghubungkan antara kekuatan manusia yang sifatnya “biasa” dengan suatu kekuatan yang “luar biasa” (1997: 367). Gambaran kesakralan komponen bagian tengah Kotagede adalah sebagai berikut (lihat juga Lampiran 4 & 5):

- ▶ **makam:** ada dua kompleks makam, yaitu Makam Agung dan makam Hastorenggo. Makam Agung adalah kompleks makam yang pertama dan di sana antara lain dimakamkan Penembahan Senopati atau Sutawijaya (van Mook, 1972: 12). Tempat ini dianggap sakral bukan hanya karena sebuah kuburan kuna, namun lebih dari itu adalah karena tokoh yang dimakamkan di sana. Kesakralan masih dapat disaksikan hingga sekarang seperti tampak pada puluhan peziarah setiap harinya yang datang, dan ratusan peziarah pada waktu-waktu tertentu. Bukan hanya itu untuk menuju makam utama harus melewati beberapa gerbang yang dijaga oleh petugas khusus. Peziarah pun diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya adalah mengenakan pakaian tradisional Jawa. Oleh karena itu dapat dimengerti mengapa tempat ini “harus” dijaga kelestariannya. Sementara itu Makam Hastorenggo (makam keluarga kerajaan atau keturunan langsung Panembahan Senopati) kondisinya tidak jauh berbeda, kecuali pada wujud fisik dan jumlah peziarah yang lebih terbatas.
- ▶ **Mesjid Agung:** sebagai *archaeological heritage* yang masih difungsikan (*living monument*) kesakralannya tidak bisa dibantah lagi. Bangunan ini jelas harus dilestarikan bukan hanya karena sebagai warisan pendiri Mataram, namun juga karena sebagai tempat orang Islam beribadah, bahkan hingga saat ini.
- ▶ **Watu Gilang dan Watu Gatheng:** *watu gilang* adalah batu hitam pipih

berbentuk persegi panjang, sedangkan *watu gatheng* berupa tiga buah batu berwarna terang mengkilap berbentuk bulat berukuran lebih kecil dari bola voli. Keduanya saat ini terletak di dalam bangunan (tambahan) yang permanen. Kesakralannya terutama berkaitan dengan mitos yang menyebutkan bahwa *watu gilang* merupakan tempat duduk Pangeran Senopati ketika dilantik sekaligus sebagai singgasana, sedangkan *watu gatheng* merupakan “mainan” putra Panembahan Senopati. Seperti halnya makam agung, tempat ini juga menjadi sasaran utama peziarah sehingga kelestariannya merupakan keharusan.

- ▶ **Cepuri:** meskipun pada dasarnya bangunan ini bersifat profan, namun karena ditujukan untuk melindungi keraton (termasuk makam dan mesjid), maka beberapa bagian bangunan yang masih ada oleh masyarakat juga dianggap sakral. Oleh karena itu kelestarian bagian bangunan yang masih ada diupayakan untuk tetap terjaga.

6. PENUTUP: Upaya Pelestarian Baluwarti

- ▶ Tidak dapat disangkal bahwa:
- ▶ *Baluwarti* adalah batas fisik Kotagede yang dibangun pada abad XVI dan kini di ambang kemusnahan
- ▶ Ada perbedaan dalam cara memandang dan menempatkan *baluwarti*, yaitu antara warisan yang semestinya dilestarikan dan sebagai lahan potensial untuk berbagai tuntutan (perumahan, pertanian, jalan lingkar)
- ▶ Perbedaan laju kerusakan antara *baluwarti* dengan bagian tengah kota kemungkinan karena adanya pandangan kultural yang berbeda terhadap karakter kedua bagian kota ini; *baluwarti* dipandang sebagai sesuatu yang “tidak ada apa-apanya”, sedangkan warisan di bagian tengah kota dipandang sebagai sesuatu yang sakral

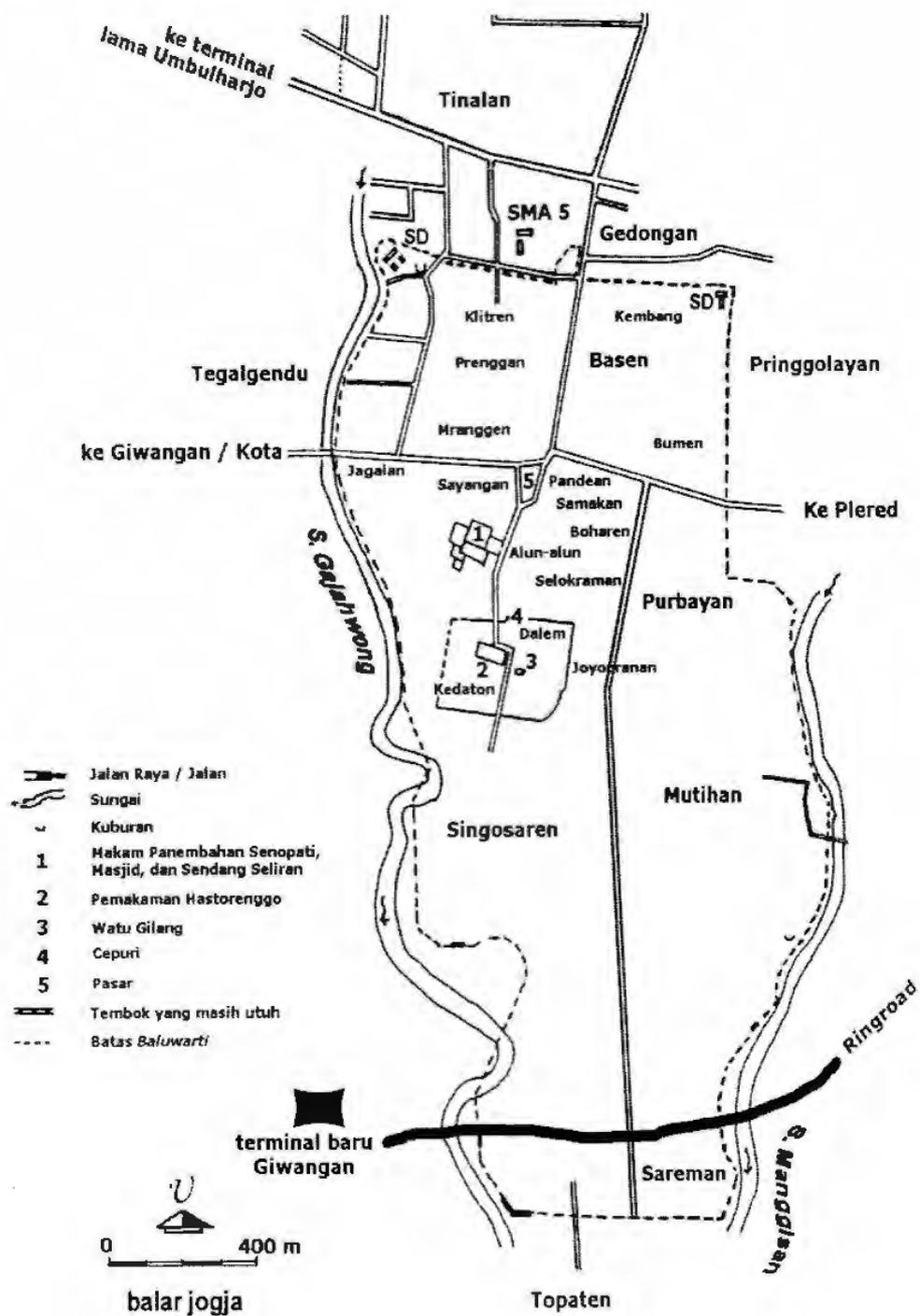
Upaya pelestarian *baluwarti* berarti upaya untuk meyakinkan penduduk, pengembang, dan pemerintah (daerah) bahwa bangunan ini (seberapa pun sisanya) adalah bagian integral Kotagede kuna. Hal ini sama artinya untuk mengubah pandangan dan sikap mereka terhadap keprofanan *baluwarti*. Tidak berlebihan jika diusulkan pendekatan antropologis, Ember, Carol L. & Melvin Ember 1990. “Antropologi Terapan”. Dalam T.O. Ihromi (ed.). **Pokok-pokok** Ember, Carol L.

satu *applied anthropology* (Harris, 1997: 410) adalah pendekatan yang paling cocok. Namun demikian, ada peringatan bahwa perubahan yang diinginkan harus secara cermat diperhitungkan segi manfaatnya, khususnya terhadap penduduk setempat (Ember & Melvin Ember, 1990: 127-129), sehingga penting artinya untuk memahami secara mendasar kebudayaan masyarakat setempat saat ini. Harus diakui bahwa penelitian, pelestarian, serta pemanfaatan merupakan aspek dominan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Jika masing-masing aspek merupakan bagian dari proses manajemen, maka bentuk skema proses tersebut haruslah berwujud siklus, dan bukan linear seolah-olah ada pangkal – ujung atau hulu – hilir. Oleh karena itu, hubungan ketiga aspek tersebut sebenarnya berada dalam kerangka yang bersifat resiprokal. Dalam kedudukan ini, masing-masing aspek berada dalam peran yang “dibutuhkan – membutuhkan” terhadap aspek lainnya. Dalam konteks ini pula, aspek pelestarian merupakan titik paling strategis sekaligus sebagai *entry point* guna menuju dua aspek lainnya.

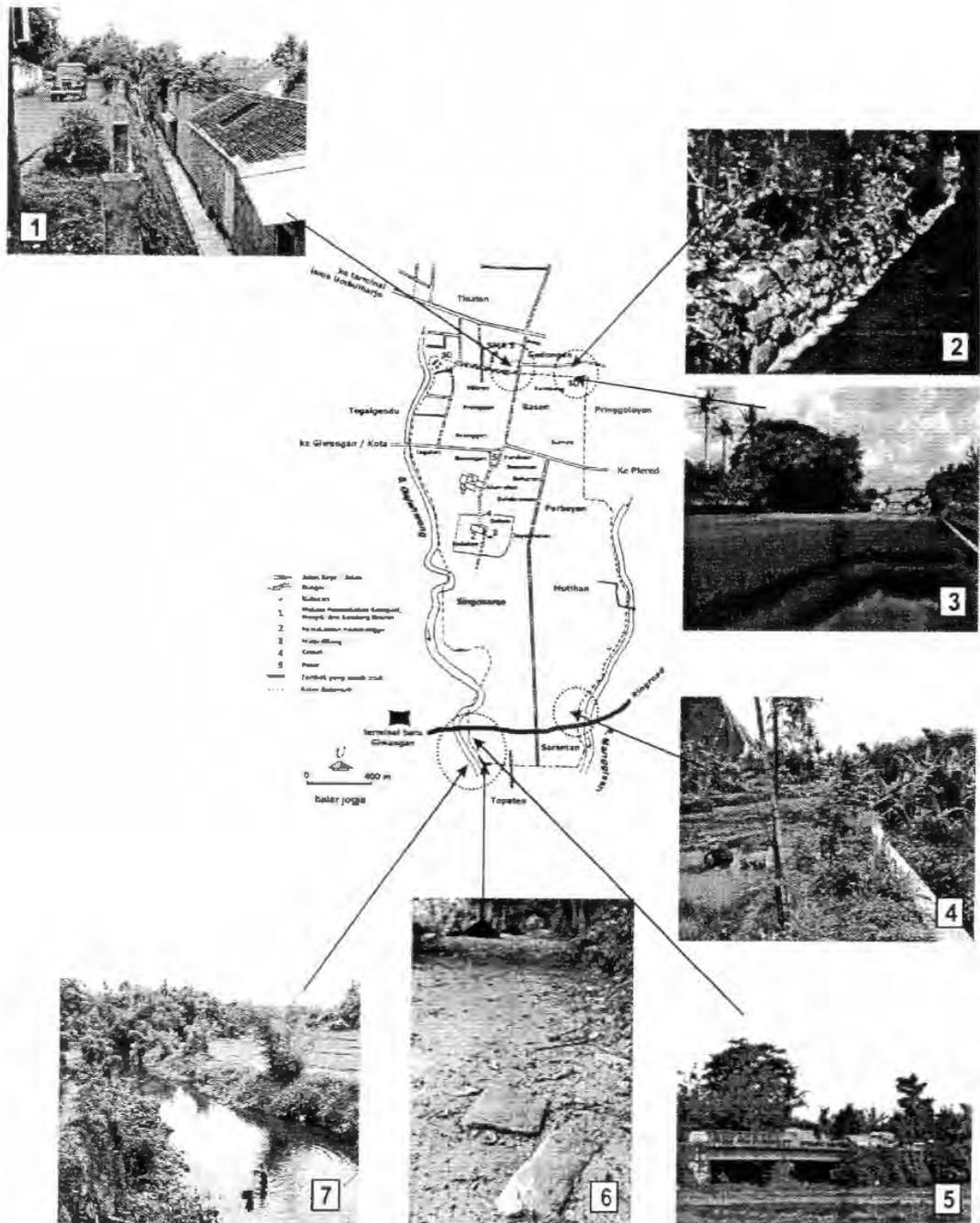
DAFTAR PUSTAKA

- Andrisijanti, Inajati. 1997. *Kota Gede, Plered, dan Kartasura sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam (± 1578 TU – 1746 TU)*. Disertasi, UGM Yogyakarta.
- Atmosudiro, Sumijati. 2002. “Tata Ruang Permukiman Kota Gede Kuna dan Orang Kalang: Dalam Perspektif Profesionalisme Pekerjaan”. Dalam *Jurnal Kebudayaan Kabanaran*. Volume 2, Agustus 2002. Hlm. 143-160.
- Beerling, dkk. 1986. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Terjemahan: Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Brandes, JLA. 1894. “Yogyakarta”, *TBG* No. XXXVII.
- Cooper, Chris. 1991. “The Technique of Interpretation” dalam *Managing Tourism*, S. Medlik (ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd. 224-229.

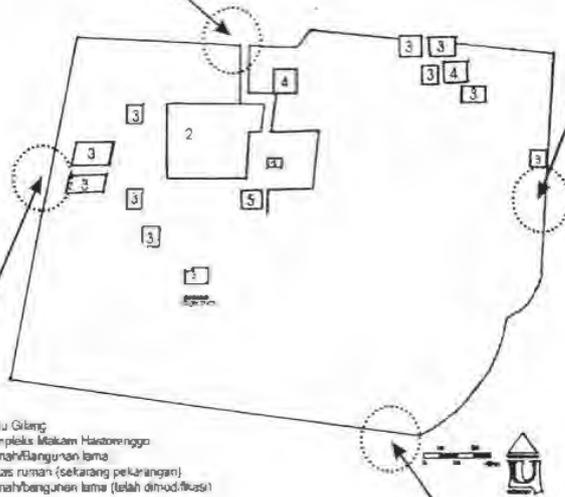
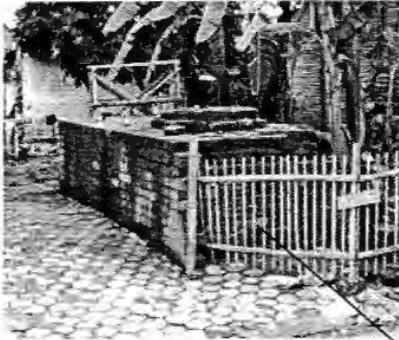
- Ember 1990. "Antropologi Terapan". Dalam T.O. Ihromi (ed.). *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Cetakan ke-enam. Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 121-139.
- Harris, Marvin. 1997. *Culture, People, Nature. An Introduction to General Anthropology*. 7th edition. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Hodder, Ian 1991. "Post-modernism, Post-structuralism, and Post-processual Archaeology". Dalam Ian Hodder (ed). *The Meaning of Things*. London: Harper Collins.
- Kaplan, David & Albert A. Manners. 2002. *Teori Budaya*. Terj. Landung Simatupang. Cetakan III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prapanca, Indung & Imam Sunaryo. 2003. "Pleret, Kota Gede dan Yogyakarta Kuno" dalam *Mosaik Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala Yogyakarta. Hlm. 106-138.
- Renfrew, Colin & Paul Bahn. 1996. *Archaeology. Theories, Method, and Practise*. 2nd edition. London: Thames and Hudson Ltd.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2003. "Arkeologi Pasca-Prosesual: Alam Pikir Pasca-Modernisme dalam Arkeologi". Dalam *Artefak*. No. 25/Desember 2003.
- van Mook, H.J. 1972. *Kuta Gede*. Terjemahan dari "Koeđa Ge¹/₄³/₄", terbit dalam *Koloniaal Tijdschrift XV*, 1926, hlm. 353-400. Djakarta: Bhratara.



Lampiran 2. Citra Kotagede kuna sebenarnya meliputi **baluwarti** hingga seluruh isi di dalamnya; pelestarian yang cenderung terfokus pada bagian tengah (no. 1 – 4) mengakibatkan tembok kota berangsur-angsur musnah



Lampiran 3. Potret wajah baluwarti sekarang: 1. perumahan Sendok Indah tepat di atas jagang; 2. batu putih sisa baluwarti digunakan sebagai fondasi pagar; 3 & 4. jagang dimanfaatkan sebagai sawah; 5. jalan lingkar yang menembus Kotagede lama, termasuk baluwarti; 6. serakan batu putih sisa baluwarti; 7. Sungai Gajahwong yang berhimpit dengan sudut barat-daya baluwarti kini menjadi tempat penambangan pasir



Lampiran 4. Tembok cepuri di bagian tengah kota cenderung disakralkan bersama komponen kota lainnya seperti mesjid, makam, serta lapangan watu gilang; oleh karena itu sebagian sisi tembok cepuri masih terlihat kokoh



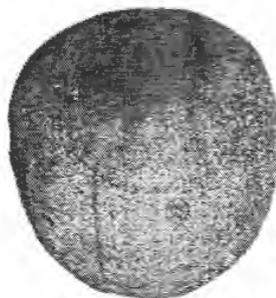
gerbang mesjid agung Kotagede, terletak di sebelah utara Cepuri



Gerbang Kompleks Makam Hastorenggo dengan latar belakang cungkup di Lapangan Watu Gilang



Isi cungkup terdiri atas watu gilang, watu gatheng, dan tempayan batu; kesakralan antara lain tercermin dari berdatangnya para peziarah ke sini



Lampiran 5.

Berkala Arkeologi Tahun XXI/1 Edisi No. 1 / Mei 2006